

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terjadi ketika aktivitas ekonomi meningkat, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat juga mengalami peningkatan dan menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat.² Salah satu indikator penting kemajuan perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika tingkat kegiatan ekonomi pada suatu periode lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh kegiatan ekonomi berkembang dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan GDP yang tidak memperhitungkan jika peningkatan tersebut lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan dan terjadinya perubahan ekonomi wilayah tersebut.³ Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah akan meningkat jika wilayah tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Tolak

² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*, Edisi Ketiga, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011). hal.120

³ Eko Wicaksono Pambudi dan Miyasto, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 2 no. 2 2013.

ukur pendapatan wilayah yang digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah pada periode tertentu.⁴

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk memerlukan barang ekonomi yang semakin meningkat untuk penduduknya. Kapasitas ini berkembang seiring kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukan.⁵ Menurut teori klasik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk miskin, modal, tenaga kerja, sumber daya yang ada, serta tingkat teknologi yang dipergunakan.⁶

Pertumbuhan ekonomi memiliki efek positif dan negatif terhadap suatu negara. Jika suatu perekonomian mengalami pertumbuhan positif dalam periode tertentu, maka ini menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas ekonomi pada periode tersebut. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka hal ini menandakan adanya penurunan dalam aktivitas ekonomi pada periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu kunci dalam mencapai tujuan ekonomi makro.

⁴ Irena Ade Putri dan Yoyok Soesatyo, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* Vol 4 no. 3 2016.

⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 337

⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). hal.433-437.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten/Kota Jawa Timur

Kabupaten/Kota Jawa Timur	Pertumbuhan Ekonomi menurut kabupaten/Kota			
	Dalam Kabupaten/Kota (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	5.47	5.08	-1.84	2.49
Kabupaten Ponorogo	5.27	5.01	-0.90	3.19
Kabupaten Trenggalek	5.03	5.08	-2.17	3.65
Kabupaten Tulungagung	5.21	5.32	-3.09	3.53
Kabupaten Blitar	5.10	5.12	-2.29	3.02
Kabupaten Kediri	5.07	5.06	-2.41	3.06
Kabupaten Malang	5.55	5.49	-2.68	3.12
Kabupaten Lumajang	5.00	4.61	-2.79	3.14
Kabupaten Jember	5.02	5.51	-2.98	4.00
Kabupaten Banyuwangi	5.84	5.55	-3.58	4.08
Kabupaten Bondowoso	5.08	5.30	-1.36	3.49
Kabupaten Situbondo	5.46	5.44	-2.33	3.26
Kabupaten Probolinggo	4.47	4.56	-2.12	3.35
Kabupaten Pasuruan	5.73	5.83	-2.03	4.34
Kabupaten Sidoarjo	6.01	5.99	-3.69	4.21
Kabupaten Mojokerto	5.88	5.81	-1.11	4.12
Kabupaten Jombang	5.29	5.10	-1.98	3.24
Kabupaten Nganjuk	5.38	5.36	-1.71	3.61
Kabupaten Madiun	5.10	5.42	-1.69	3.34
Kabupaten Magetan	5.21	5.04	-1.64	3.04
Kabupaten Ngawi	5.21	5.05	-1.69	2.55
Kabupaten Bojonegoro	4.39	6.34	-0.40	-5.54

Lanjutan tabel 1.1

Kabupaten/Kota Jawa Timur	Pertumbuhan Ekonomi menurut kabupaten/Kota			
	Dalam Kabupaten/Kota (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Tuban	5.15	5.14	-5.85	3.00
Kabupaten Lamongan	5.44	5.43	-2.65	3.43
Kabupaten Gresik	5.81	5.42	-3.68	3.79
Kabupaten Bangkalan	4.22	1.03	-5.59	-2.07
Kabupaten Sampang	4.11	1.85	-0.29	0.22
Kabupaten Pamekasan	5.46	4.92	-2.54	3.41
Kabupaten Sumenep	3.63	0.14	-1.13	2.61
Kota Kediri	5.43	5.47	-6.25	2.50
Kota Blitar	5.82	5.84	-2.28	4.28
Kota Malang	5.72	5.73	-2.26	4.21
Kota Probolinggo	5.93	5.94	-3.64	4.06
Kota Pasuruan	5.54	5.56	-4.33	3.64
Kota Mojokerto	5.80	5.65	-3.69	3.65
Kota Madiun	5.96	5.69	-3.39	4.73
Kota Surabaya	6.19	6.09	-4.85	4.29
Kota Batu	6.50	6.51	-6.46	4.04
Jawa Timur	5.47	5.53	-2.23	3.57

Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 senilai 5.47%, 5.53% dan pada tahun 2020 semua wilayah kabupaten/ kota Jawa Timur mengalami minus lalu di tahun 2021 mulai mengalami kenaikan. Kota Batu yang mendapatkan angka tertinggi 6.50%. Sedangkan yang terendah Kabupaten Sumenep 2.44%.

Proses sistematis dari pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melibatkan pengembangan hak milik, spesialisasi, dan pembagian kerja, yang merupakan faktor historis yang saling terkait dengan laju perkembangan perekonomian. Dalam proses ini, masyarakat bergerak dari tradisional ke kapitalis. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi memiliki dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.⁷ Ketika seseorang tidak mampu memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup, itu dapat dianggap sebagai kemiskinan.

Kemiskinan muncul ketika keadaan dimana seseorang ataupun lebih tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran yang dianggap dengan standar kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Kemiskinan untuk sekarang ini merupakan masalah yang penting, sehingga dibutuhkanlah campur tangan dari pemerintah, karena dalam ekonomi kemiskinan adalah suatu permasalahan yang utama yang harus dientaskan.

Ragnar Nurkse menyatakan dalam teori lingkaran kemiskinan bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat akibat dari keterbatasan pasar dan modal yang berdampak pada rendahnya produktivitas.⁸ Setiap daerah akan berupaya keras untuk mencapai pembangunan yang optimal sehingga pertumbuhan ekonominya

⁷ Puti Daniny dan Pipit M, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* Vol 1, no. 2 2017.

⁸ Muhammad Nuh, *Kebijakan Pembangunan Di Perkotaan* (Malang: UB Press, 2017). hal.52

bisa meningkat. dan bisa menurunkan angka kemiskinan.⁹ Permasalahan ini masih memerlukan perhatian yang serius agar terselesaikannya masalah sosial kemiskinan, karena menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kemiskinan merupakan bentuk masalah sosial, sehingga harus diantisipasi. Munculnya kemiskinan akan berdampak pada tidak berkembangnya perekonomian, karena kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat melaksanakan kehidupan sosialnya dengan baik. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan dan juga ketimpangan dalam masyarakat. Kemiskinan secara umum merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

Tabel 1.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin			
	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur				
Kabupaten Pacitan	14,19	13.67	14.54	15.11
Kabupaten Ponorogo	10,36	9.64	9.95	10.26
Kabupaten Trenggalek	12,02	10.98	11.62	12.14

⁹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia* (Jakarta: Erlangga, 2011). hal.180

¹⁰ Mohammad Rokib, *Teologi Bencana: Studi Santri Tanggap Bencana* (Yogyakarta: Pital, 2013). hal. 92

Lanjutan tabel 1.2

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin			
	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur				
Kabupaten Tulungagung	7.27	6.74	7.33	7.51
Kabupaten Blitar	9.72	8.94	9.33	9.65
Kabupaten Kediri	11.31	10.42	11.4	11.64
Kabupaten Malang	10.37	9.47	10.15	10.5
Kabupaten Lumajang	9.98	9.49	9.83	10.05
Kabupaten Jember	9.98	9.25	10.09	10.41
Kabupaten Banyuwangi	7.80	7.52	8.06	8.07
Kabupaten Bondowoso	14.39	13.33	14.17	14.73
Kabupaten Situbondo	11.82	11.2	12.22	12.63
Kabupaten Probolinggo	18.71	17.76	18.61	18.91
Kabupaten Pasuruan	9.45	8.68	9.26	9.7
Kabupaten Sidoarjo	5.69	5.32	5.59	5.93
Kabupaten Mojokerto	10.08	9.75	10.57	10.62
Kabupaten Jombang	9.56	9.22	9.94	10
Kabupaten Nganjuk	12.11	11.24	11.62	11.85
Kabupaten Madiun	11.42	10.54	11.46	11.91
Kabupaten Magetan	10.31	9.61	10.35	10.66
Kabupaten Ngawi	14.83	14.39	15.44	15.57
Kabupaten Bojonegoro	13.16	12.38	12.87	13.27
Kabupaten Tuban	15.31	14.58	15.91	16.31
Kabupaten Lamongan	13.80	13.21	13.85	13.86
Kabupaten Gresik	11.89	11.35	12.4	12.42
Kabupaten Bangkalan	19.59	18.9	20.56	21.57
Kabupaten Sampang	21.21	20.71	22.78	23.76
Kabupaten Pamekasan	14.47	13.95	14.6	15.3

Lanjutan tabel 1.2

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin			
	2018	2019	2020	2021
Jawa Timur				
Kabupaten Sumenep	20.16	19.48	20.18	20.51
Kota Kediri	7.68	7.16	7.69	7.75
Kota Blitar	7.44	7.13	7.78	7.89
Kota Malang	4.10	4.07	4.44	4.62
Kota Probolinggo	7.20	6.91	7.43	7.44
Kota Pasuruan	6.77	6.46	6.66	6.88
Kota Mojokerto	5.50	5.15	6.24	6.39
Kota Madiun	4.49	4.35	4.98	5.09
Kota Surabaya	4.88	4.51	5.02	5.23
Kota Batu	3.89	3.81	3.89	4.09
Jawa Timur	10.98	10.37	11.09	11.4

Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, namun di tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan. Pada Kabupaten Sampang menjadi wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi selama 5 tahun di 2018 –2021 yaitu 23.56 % dan 23.76 % di tahun 2021. Sedangkan itu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah terdapat di wilayah Kota Batu di 5 tahun tersebut, yaitu 3.89 % di tahun 2018 dan 2021 sebesar 4.09 %.

Selain tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan bisa terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Ukuran atau untuk melihat terjadinya ketimpangan

distribusi pendapatan menggunakan rasio gini. Angka gini rasio bernilai antara nol dan satu. Jika, rasio gini mencapai angka nol maka menunjukkan kesetaraan sempurna atau rendahnya ketimpangan dan sebaliknya apabila rasio gini mendekati angka satu maka menunjukkan ketidaksetaraan atau adanya ketimpangan yang tinggi.

Ketimpangan memiliki efek positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat memberikan motivasi kepada wilayah lain yang kurang maju untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun, dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan ketidakefisienan ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta dianggap tidak adil terutama jika ketimpangannya sangat tinggi.¹¹

Tabel 1.3
Rasio Gini Kabupaten/Kota Jawa Timur

Kabupaten/Kota Jawa Timur	Gini Ratio			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	0,35	0,40	0,35	0,34
Kabupaten Ponorogo	0,35	0,35	0,38	0,37
Kabupaten Trenggalek	0,39	0,37	0,38	0,34
Kabupaten Tulungagung	0,37	0,30	0,34	0,33
Kabupaten Blitar	0,38	0,33	0,35	0,35
Kabupaten Kediri	0,33	0,30	0,33	0,33
Kabupaten Malang	0,38	0,38	0,37	0,37
Kabupaten Lumajang	0,32	0,30	0,30	0,31
Kabupaten Jember	0,34	0,30	0,32	0,34
Kabupaten Banyuwangi	0,31	0,31	0,32	0,37

¹¹ Hastina Febriaty, "Pengaruh Gini Ratio, Pdrb Perkapita Dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara," *Quantitative Economics Journal* Vol 6, no. 3 2020.

Lanjutan tabel 1.3

Kabupaten/Kota Jawa Timur	Gini Ratio			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bondowoso	0,35	0,30	0,33	0,33
Kabupaten Situbondo	0,36	0,32	0,30	0,32
Kabupaten Probolinggo	0,34	0,33	0,33	0,33
Kabupaten Pasuruan	0,32	0,31	0,35	0,34
Kabupaten Sidoarjo	0,35	0,31	0,34	0,35
Kabupaten Mojokerto	0,31	0,27	0,33	0,29
Kabupaten Jombang	0,32	0,33	0,33	0,33
Kabupaten Nganjuk	0,31	0,42	0,33	0,31
Kabupaten Madiun	0,33	0,33	0,36	0,36
Kabupaten Magetan	0,38	0,36	0,32	0,36
Kabupaten Ngawi	0,35	0,34	0,34	0,31
Kabupaten Bojonegoro	0,35	0,31	0,30	0,34
Kabupaten Tuban	0,36	0,30	0,34	0,34
Kabupaten Lamongan	0,31	0,32	0,30	0,29
Kabupaten Gresik	0,27	0,28	0,30	0,31
Kabupaten Bangkalan	0,29	0,31	0,32	0,30
Kabupaten Sampang	0,26	0,27	0,26	0,27
Kabupaten Pamekasan	0,33	0,34	0,32	0,32
Kabupaten Sumenep	0,25	0,30	0,26	0,29
Kota Kediri	0,33	0,32	0,35	0,37
Kota Blitar	0,35	0,34	0,34	0,37
Kota Malang	0,41	0,34	0,40	0,41
Kota Probolinggo	0,31	0,27	0,31	0,30
Kota Pasuruan	0,34	0,31	0,30	0,35
Kota Mojokerto	0,34	0,31	0,35	0,33
Kota Madiun	0,36	0,35	0,39	0,34
Kota Surabaya	0,36	0,41	0,34	0,35
Kota Batu	0,33	0,32	0,33	0,31
Jawa Timur	0,38	0,37	0,37	0,37

Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan data BPS pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa rasio gini di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 sampai 2021 semakin mendekati angka 0 meskipun penurunannya sangat sedikit. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi di angka 0,38 %. Pada tahun 2019, 2020 dan

2021 rasio gini Provinsi Jawa Timur bertahan di angka 0,37 yang artinya berada di posisi sedang.

Simon Kuznet mengemukakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk seperti huruf U. Penemuan ini dianggap sebagai proses evolusi dari distribusi pendapatan dalam peralihan dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan atau ekonomi industri. Pada tahap ini, lapangan kerja terbatas tetapi tingkat upah dan produktivitas tinggi. Awalnya, kesenjangan pendapatan antara sektor industri modern dan sektor pertanian tradisional akan meningkat dengan cepat sebelum pada akhirnya menyempit kembali. Oleh karena itu, ini dapat dilihat sebagai suatu proses transisi dari kesenjangan pendapatan yang lebar menjadi kesenjangan pendapatan yang lebih sempit di masa yang akan datang.¹²

Pengangguran merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Jika masalah pengangguran tidak ditangani dengan cepat, dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan dapat memperbesar kesenjangan ekonomi. Ketika perekonomian berkembang, akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar sehingga angka pengangguran dapat menurun.¹³

¹² Muhammad Farhan dan Sugianto Sugianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* Vol 1, no. 4 2022.

¹³ Yunani Tiya Kasanah, Anifatul Hanim, dan P. Edi Suswdani, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014," *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* Vol 5, no. 1 2018.

Pengangguran adalah keadaan di mana orang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan. Teori Keynes menyatakan bahwa dalam perekonomian suatu negara selalu terdapat tingkat pengangguran yang cenderung berada di *underemployment*. Pengangguran yang terjadi di wilayah mana saja harus segera diatasi karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Keynes menyatakan bahwa pengangguran yang terjadi disebabkan adanya kekurangan permintaan terhadap barang dan jasa secara umum, Sehingga upah di pasar tenaga kerja tidak bisa menyesuaikan dengan fleksibel. Artinya, keadaan ekonomi yang tidak berkembang permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat akan menurun yang mengakibatkan menurunnya produksi perusahaan serta banyak tenaga kerja yang tidak terpakai sehingga menimbulkan pengangguran. Dengan turunnya produksi diikuti dengan turunnya tingkat upah, namun karena tingkat upah tidak fleksibel mengakibatkan peningkatan pengangguran hal ini merupakan penyebab pengangguran karena defisiensi permintaan agregat.¹⁵

Pengangguran terbuka yaitu keadaan di mana angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Pengangguran jenis ini merupakan masalah yang signifikan karena banyak pekerja yang mengalami ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh

¹⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal. 13

¹⁵ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004). hal.389

berbagai faktor seperti penurunan aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja, atau kemunduran industri di suatu wilayah.

Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja yang terdiri dari orang yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dan berusia produktif (15-64 tahun). mudah.¹⁶ Apabila jumlah angkatan kerja meningkat tetapi jumlah lowongan pekerjaan tidak mencukupi, maka tingkat pengangguran akan meningkat dengan mudah.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur

Kabupaten/Kota Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	1.39	0.91	2.28	2.04
Kabupaten Ponorogo	3.77	3.50	4.45	4.38
Kabupaten Trenggalek	4.12	3.36	4.11	3.53
Kabupaten Tulungagung	2.53	3.29	4.61	4.91
Kabupaten Blitar	3.38	3.05	3.82	3.66
Kabupaten Kediri	4.15	3.58	5.24	5.15
Kabupaten Malang	3.15	3.70	5.49	5.40
Kabupaten Lumajang	2.46	2.73	3.36	3.51
Kabupaten Jember	4.01	3.69	5.12	5.44
Kabupaten Banyuwangi	3.59	3.95	5.34	5.42
Kabupaten Bondowoso	3.84	2.86	4.13	4.46
Kabupaten Situbondo	1.85	2.77	3.85	3.68
Kabupaten Probolinggo	4.00	3.77	4.86	4.55
Kabupaten Pasuruan	5.94	5.22	6.24	6.03
Kabupaten Sidoarjo	4.62	4.62	10.97	10.87
Kabupaten Mojokerto	4.21	3.61	5.75	5.54

¹⁶ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia* (Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014). hal.6

Lanjutan tabel 1.4

Kabupaten/Kota Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Jombang	4.56	4.28	7.48	7.09
Kabupaten Nganjuk	2.60	3.16	4.80	4.98
Kabupaten Madiun	3.71	3.52	4.80	4.99
Kabupaten Magetan	3.82	2.98	3.74	3.86
Kabupaten Ngawi	3.75	3.60	5.44	4.25
Kabupaten Bojonegoro	4.11	3.56	4.92	4.82
Kabupaten Tuban	2.76	2.70	4.81	4.68
Kabupaten Lamongan	3.10	3.89	5.13	4.90
Kabupaten Gresik	5.71	5.40	8.21	8.00
Kabupaten Bangkalan	5.09	5.62	8.77	8.07
Kabupaten Sampang	2.38	2.71	3.35	3.45
Kabupaten Pamekasan	2.88	2.26	3.49	3.10
Kabupaten Sumenep	1.75	2.08	2.84	2.31
Kota Kediri	3.56	4.15	6.21	6.37
Kota Blitar	3.98	4.54	6.68	6.61
Kota Malang	6.65	5.88	9.61	9.65
Kota Probolinggo	3.56	4.25	6.70	6.55
Kota Pasuruan	4.50	4.89	6.33	6.23
Kota Mojokerto	2.44	2.63	6.74	6.87
Kota Madiun	3.80	3.96	8.32	8.15
Kota Surabaya	6.01	5.76	9.79	9.68
Kota Batu	3.07	2.42	5.93	6.57
Jawa Timur	3.91	3.82	5.84	5.74

Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.4 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/kota provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tahun 2018 dan 2019 namun mulai mengalami kenaikan di tahun 2020 dan turun di tahun 2021 yaitu 5.74%, Sedangkan di Kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tertinggi

di Kabupaten Sidoarjo mencapai 10.97% di tahun 2020. Sedangkan angka terendah di Kabupaten Pacitan di tahun 2019 mencapai 0.91%.

Alasan pemilihan lokasi di Jawa Timur karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak dengan jumlah 29 kabupaten dan 9 kota. Namun, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur masih berada dibawah Provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur dan juga kondisi pertumbuhan masih bersifat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung melalui PDRB atas harga konstan tersebut memiliki hubungan dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Adapun alasan peneliti mengambil topik pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat yang dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila terdapat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang baik, akan memberikan dampak bagi masyarakat seperti menuntaskan kemiskinan, pendistribusian pendapatan yang merata dan membuka lowongan pekerjaan bagi para pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat membantu pemerintah dalam proses menciptakan perekonomian yang lebih maju.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan komponen penting Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti

hal tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan fluktuasi
2. Kemiskinan dapat menyebabkan stagnan perekonomian dan menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah
3. Rasio gini di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan meskipun di beberapa tahun tertentu mengalami stagnan. Sedangkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya dan setiap daerah masing masing berfluktuasi.
4. Banyaknya pengangguran terbuka disebabkan karena minimnya kesempatan lapangan kerja yang tersedia dan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang dimiliki pada daerah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?
2. Apakah Rasio Gini berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?

3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?
4. Apakah Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah pengaruh Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?
2. Untuk menguji apakah pengaruh Rasio Gini berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?
3. Untuk menguji apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?
4. Untuk menguji apakah Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan, peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan informasi yang berguna dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. khususnya dalam bidang ilmu ekonomi makro serta menambah wawasan tentang pengaruh Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur

2. Segi Praktis

a. Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah mengenai Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh peneliti lain baik dan memperluas ilmu wawasan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur dengan objek penelitian yang sama.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah ilmu pengetahuan, tambahan informasi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan atau referensi untuk penelitian yang relevan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terfokus pada variabel Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh variabel independen dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur sebagai variabel dependen.

2. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Jawa Timur yang dilihat berdasarkan data BPS realisasinya yang diteliti peneliti pada tahun 2018-2021.

G. Penegasan Istilah

Definisi operasional dalam penelitian ini menggunakan dan menganalisa lebih lanjut mengenai:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya kekurangan dalam

mencukupi kebutuhannya serta kesulitan untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.¹⁷

2. Ratio Gini

Rasio gini(Koefisien Gini) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk pada suatu negara. Di mana biasanya nilainya tersebut berkisar di antara angka nol sampai satu. Jika nilai Rasio gini yang dimiliki itu baik, maka artinya tingkat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara kelompok masyarakat kaya dan miskin pada suatu negara bisa dikatakan cukup rendah. Jika nilai Rasio gini tinggi, hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang besar antara kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan rendah.¹⁸

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka adalah suatu kondisi di mana jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan melebihi jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Penyebab dari pengangguran terbuka bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau kemunduran dalam perubahan suatu industri.¹⁹

¹⁷ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). hal. 6

¹⁸ Dodik Ridho Nurrochmat Dkk, *Kebijakan Pembangunan Kehutanan Dan Lingkungan*, (Bogor: IPB Press, 2016). hal. 95

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga...*, hal.330

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam produksi barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi (output) di suatu wilayah yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari enam sub bab, sistematika skripsi bertujuan untuk memudahkan dan memperjelas pembahasan dan analisis data. Maka dari itu sistematika skripsi adalah :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini dijelaskan dengan rinci tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pada penulisan

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini mulai mengkaji teori yang didapatkan dari penelitian terdahulu. Teori teori dari buku dan bahasa mengenai variabel dan kerangka komseptual di penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi pendekatan dan jenis pada penelitian, sampel dan populasi, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan tahapan di dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini mengkaji tentang isi data dalam pertanyaan pada penelitian dan hasil analisis data pada obyek dari pengamatan dan informasi yang bisa digali.

²⁰ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan...*, hal.5

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bahasan dari temuan atau hasil penelitian dengan mengacu pada teori teori yang didapat dari studi pustaka.

BAB VI PENUTUP. Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari sripsi dan dilengkapi saran. Bab ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran, surat keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup